



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 10A TAHUN 2019**  
**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, yang mana didalam perubahan tersebut mengakomodir terkait indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bangka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 10A TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 - 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112) diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Januari 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 6 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10A TAHUN 2019  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023.

A. PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
<i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi</i>	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka oleh Kemenpan RB	Hasil Evaluasi AKIP dari Kemenpan RB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan</li> <li>2. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah</li> <li>3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan</li> <li>4. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan</li> </ol>
			Indeks SPBE	Terdiri dari Komponen Indeks Domain Kebijakan, Indeks Domain Tata Kelola dan Indeks Domain Layanan	Hasil Evaluasi SPBE	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
			Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Standar Profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 dimensi yakni a) Kualifikasi; b) Kompetensi; c) Disiplin; dan d) Kinerja	Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN oleh BKPSDMD	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Hasil Penilaian BPK terhadap LKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan</li> <li>2. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</li> <li>3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik</li> </ol>
	3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal</li> <li>2. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan</li> <li>3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan</li> <li>5. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Beidang Perhubungan</li> </ol>

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
<i>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</i>	4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	<p>Jumlah Tahun yang digunakan oleh Penduduk dalam Menjalani Pendidikan Formal</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p>Dimana :  RSL = Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas  xi = Lama Sekolah Penduduk ke-i yang berusia 25 Tahun  n = Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas</p>	BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik</li> </ol>
			Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya Sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh Anak pada Umur tertentu di Masa Mendatang	BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Sosial</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik</li> </ol>

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Rata – Rata Tahun Hidup yang masih akan dijalani oleh Seseorang yang telah berhasil Mencapai Umur x, Pada Suatu Tahun tertentu, dalam Situasi Mortalitas yang berlaku di Lingkungan Masyarakatnya	BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan</li> <li>2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup</li> <li>3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>5. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>6. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pangan</li> <li>7. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>8. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>9. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik</li> </ol>

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Angka Stunting	$= \frac{\text{Jumlah Baduta Stunting}}{\text{Jumlah Baduta}} \times 100\%$ <p>Penilaian Hasil Pengukuran Antropometri terhadap Tinggi Badan (Usia 2 Tahun atau Lebih) dengan 2 Macam Alat Ukur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Baby Length Board</i></li> <li>▪ <i>Vertical Measures</i></li> </ul> <p>Analisis Hasil Pengukuran Antropometri dengan Menggunakan Nilai Skor – Z atau SD</p>	Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan</li> <li>2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup</li> <li>3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Sosial</li> <li>5. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pangan</li> <li>6. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>7. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>8. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>9. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</li> <li>10. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ol>



MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						11. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
	6	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	<i>Total Fertility Rate/</i> Angka Kelahiran Total	Jumlah Anak yang akan dipunyai Seorang Wanita Selama Masa Reproduksi per 1000 Wanita  $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR i$ TFR = <i>Total Fertility Rate</i> (Angka Kelahiran Total) ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	BPS	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan 3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik 6. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 7. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Sosial

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	7	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - Laki}}$ <p>IPG = Indeks Pembangunan Gender IPM = Indeks Pembangunan Manusia</p>	BPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik</li> </ol>
			Status Kabupaten Layak Anak	Status Kabupaten yang Mempunyai Sistem Pembangunan Berbasis Hak Anak Melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Menjamin terpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</li> <li>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan</li> </ol>

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
			Status Kabupaten Layak Pemuda	Hasil Penilaian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja 3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Sosial
	8	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Nilai Pengeluaran Perkapita dan Paritas Daya Beli $Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{PPP}$ Dimana : $Y_t^{**}$ = Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan $Y_t^*$ = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan $PPP$ = Paritas daya beli wilayah	BPS	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja 3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan 4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						5. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Sosial 6. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pangan 8. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
<i>Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah</i>	9	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	$\sqrt[4]{\text{kualitas jalan baik} \times \text{kualitas air bersih} \times \text{kualitas internet 4G} \times \text{kualitas sanitasi layak} \times 100}$	Data Infrastruktur Diolah	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
			Indeks Pemerataan Infrastruktur	$\sqrt[5]{\text{akses jalan} \times \text{akses air} \times \text{akses sanitasi} \times \text{akses telekomunikasi} \times \text{akses listrik} \times 100}$	Data Infrastruktur Diolah	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
<i>Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional</i>	10	Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Masyarakat	<i>Spending Of Money</i>	<p><i>Spending Of Money</i> = Rata - Rata Nilai Belanja Wisatawan Domestik dan Mancanegara</p> <p><i>Dimana :</i>  Domestik = Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik x Rata - Rata Nilai Belanja Wisatawan Domestik dan Mancanegara</p> <p>M mancanegara = Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara x Rata - Rata Nilai Belanja Wisatawan Domestik dan Mancanegara</p>	Rekap Data Kunjungan Wisatawan	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal 4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Industri 5. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan 8. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						9. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan 10. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
<i>Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan</i>	11	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Indeks PDRB	$\text{Indeks PDRB}_n = \left[ \frac{(\text{PDRB Atas Dasar Harga Konstan}_n - \text{Garis Kemiskinan}_n)}{(\text{PDRB Atas Dasar harga Konstan}_{2023} - \text{Garis Kemiskinan}_n)} \right] \times 100$	BPS diolah	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pertanian 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal 4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja 5. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan 6. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						8. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan 9. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 10. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Sosial
	12	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum [ Fp_i \times (Fe_i + Fe_{i-1}) ]$ <p> <math>Fp_i</math> : Frekuensi penduduk kelas pengeluaran ke-i  <math>Fe_i</math> : Frekuensi kumulatif jumlah pengeluaran di kelas pengeluaran ke-i  <math>Fe_{i-1}</math> : Frekuensi kumulatif jumlah pengeluaran di kelas pengeluaran ke-i-1           </p>	BPS	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Sosial 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 6. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Wilayah Kecamatan 7. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 8. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						9. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan 10. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik 11. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pertanian 12. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	$IKLH = (30\% \times IPU) + (30\% \times IPA) + (40\% \times ITH)$ Dimana : IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITP = Indeks Tutupan Hutan	SLHD	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan 3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Indeks Resiko Bencana	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Dimana : Risk = Risiko Hazard = Bahaya Vulnerability = Kerentanan Capacity = Kapasitas	Buku Indeks Risiko Bencana Daerah	1. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Sosial 3. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman



MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						4. Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan

#### B. PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN	NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Terhadap Masyarakat	1	Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Indeks Akses Pendidikan (IAP)	$[AP1 + AP2 + AP3 + AP4 + AP5 + AP6 + AP7 + AP8 + AP9]$ <p style="text-align: center;">9 AP (Akses Pendidikan)</p> <p>Keterangan :  AP1 = APK PAUD  AP2 = Rasio Ketersediaan lembaga PAUD  AP3 = APK SD  AP4 = APM SD  AP5 = Rasio ketersediaan ruang SD  AP6 = APK SMP  AP7 = APM SMP  AP8 = Rasio ketersediaan ruang SMP  AP 9 = Persentase lembaga formal berizin</p>	DAPODIK DINDIKPORA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

	2	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Indeks Mutu Pendidikan (IMP)	$\frac{MP1 + MP2 + MP3 + MP4 + MP5 + MP6 + MP7 + MP8 + MP9 + MP10 + MP11 + MP12 + MP13}{13}$ <p>13 MP (Mutu Pendidikan)</p> <p>Keterangan :  MP1 = Lembaga PAUD terakreditasi A  MP2 = Persentase Lembaga PAUD yang memiliki APE  MP3 = Persentase SD yang terakreditasi  MP4 = Persentase SD yang terakreditasi A  MP5 = Persentase SMP yang terakreditasi  MP6 = Persentase SMP yang terakreditasi  MP7 = Persentase Lembaga Non Formal yang terakreditasi  MP8 = Rata-rata Nilai Ujian SD  MP 9 =Rata- rata Nilai Ujian SMP  MP10=Nilai Belajar PAUD  MP11= Persentase Guru S1/D4  MP12= Persentase Tenaga Kependidikan yang bersertifikat  MP13= Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan KTSP K13</p>	DAPODIK DINDIKPORA	
Meningkatnya Kualitas Anak Perempuan Dan Pemuda	3	Meningkatnya Kualitas Pemuda Daerah	Indeks Kualitas Pemuda Daerah (IKP)	$\frac{IP1 + IP2 + IP3}{3}$ <p>3 IP (Indeks Pemuda)</p> <p>Keterangan :  IP1 = Indeks Penyadaran Pemuda  IP2 = Indeks Pemberdayaan Pemuda  IP3 = Indeks Pengembangan Pemuda</p>	BIDANG PORA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah	Indeks Kualitas Olahraga Daerah (IKO)	$\frac{IK1 + IK2 + IK3}{3}$ <p>3 IK (Indeks Keolahragaan )</p> <p>Keterangan :  IK1 = Indeks Kualitas Olahraga Pendidikan  IK2 = Indeks Kualitas Olahraga Rekreasi  IK3 = Indeks Kualitas Olahraga Prestasi</p>	BIDANG PORA	

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (1/100.000 KH)	$\frac{\text{Jumlah Kematian Karena Kehamilan, Persalinan, masa nifas atau komplikasi - komplikasi selama 1 periode}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup selama periode yang sama dikali}} \times 100.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (1/1.000 KH)	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0 - 11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup diwilayah pada kurun Waktu yang sama}} \times 1.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	$\frac{\text{Jumlah kasus gizi buruk balita berdasarkan BB/TB disuatu wilayah pada periode tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita yang ada disuatu wilayah periode tertentu}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	
			Angka Kesakitan (Morbiditas)	$\frac{\text{Indeks Penyakit menular} + \text{Indeks Penyakit Tidak Menular}}{2}$	Bidang P2PL Dinas Kesehatan	
	2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai dari hasil survey IKM	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur	1	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{panjang jalan}} \times 100\%$	Data ruas Jalan Kabupaten Bangka	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Persentase irigasi} + \text{jumlah persentase drainase}}{2}$	Data Jembatan Kabupaten Bangka	
	2	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Dasar	Persentase RT Yang Terakses Air Bersih	$\frac{\text{jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih}}{\text{jumlah rumah tangga kabupaten}} \times 100\%$	Data Air bersih RT	

			Presentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	$\frac{\text{jumlah RT yang memiliki akses sanitasi}}{\text{jumlah RT kab bangka}} \times 100\%$	Data sanitasi RT	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah advice planning yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Permohonan advice planning}} \times 100\%$	Data RTRW Kabupaten Bangka	
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	1	Meningkatnya pemenuhan rumah yang layak bagi masyarakat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah layak Huni pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$	Data Rumah Layak Huni Kabupaten	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Luas pemukiman kumuh}_{(tahun\ n-1)} - \text{Luas permukiman kumuh}_{(tahun\ n)}}{\text{Luas pemukiman kumuh}_{(tahun\ n-1)}} \times 100\%$	SK Kumuh Kabupaten Bangka	
	3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pertanahan	Indeks Pengelolaan Pertanahan	persentase usaha yang memiliki izin lokasi ditambah persentase luas lahan pemerintah daerah yang tersedia untuk pembangunan ditambah persentase penurunan konflik pertanahan	Data Pertanahan Kabupaten	
Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$= \frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap}_n - \text{Produksi Perikanan Tangkap}_{n-1}}{\text{Produksi Perikanan Tangkap}_{n-1}} \times 100\%$	Bidang PNK, Bidang P2PTPI	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan
			Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	$= \frac{\text{Produksi Perikanan Budidaya}_n - \text{Produksi Perikanan Budidaya}_{n-1}}{\text{Produksi Perikanan Budidaya}_{n-1}} \times 100\%$	Bidang PPI, Bidang PUKPI, Bidang P2PTPI	
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase Desa Kategori Cepat Berkembang (PERMENDAGRI 81/2015 )	$\frac{\text{Jumlah Desa Kategori Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Hasil Penghitungan Tingkat Perkembangan Desa	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan	Persentase lingkungan yang dikelola	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola + Persentase Lahan yang direhabilitasi	Data RTH Kabupaten	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
			Persentase pemrakarsa yang menaati izin lingkungan.	Jumlah Pemrakarsa yang memenuhi syarat dibagi jumlah Pemrakarsa yang ditarget	Data Perizinan Lingkungan	

	2	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah + persentase penanganan sampah	Data Pengelolaan Sampah	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan Perencanaan meliputi keselarasan antar perencanaan (KP), diukur dengan rumus : $KP = (K1+K2+K3+K4+K5)/5$ K1 = Persentase Klarasan RPJMD terhadap RPJMN K2 = Persentase Klarasan RKPD terhadap RKP K3 = Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD K4 = Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD K5 = Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
	2	Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan	Persentase Pelaksanaan Program Tahunan yang sesuai RPJMD	Persentase dihitung dengan rumus : $= \frac{\sum \text{Capaian Sasaran Daerah yang sesuai target}}{\sum \text{Sasaran Daerah}} \times 100\%$		
	3	Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat	Persentase dihitung dengan rumus : $K = \frac{\sum \text{aspek data Pendukung Perencanaan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{aspek data pendukung perencanaan yang tersedia}} \times 100\%$	Bidang Supras dan Bidang Sosek	
	4	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan	Persentase dihitung dengan rumus : $= \frac{\sum \text{Penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan}}{\sum \text{Penelitian yang dilaksanakan}} \times 100\%$	Bidang Litbang	

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Persentase ASN dengan nilai baik pada P2KP	Jumlah ASN dengan nilai P2KP sama dengan atau lebih dengan kategori “ Baik” dibagi Jumlah Total ASN dikali seratus persen	Nilai P2KP ASN	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
	2	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang berkualitas	Indeks kepuasan ASN	Nilai Indeks diperoleh dari pengukuran kuesioner	Kuesioner Kepuasan ASN	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	1	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang di terbitkan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan pemerintahan} + \text{layanan publik berbasis TIK yang terintegrasi}}{\text{seluruh layanan yang diharapkan}} \times 100\%$	Data e-gov	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatnya Keberagaman dan keseimbangan Gizi yang dikonsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	menggunakan metode survey recall 2 x 24 jam dan kemudian dianalisis menggunakan software pola pangan harapan	Data sekunder SUSENAS BPS	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pangan
	2	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar	Persentase Keamanan Pangan Segar	Jumlah sampel aman yang diuji menggunakan RapiT Tes Tes Kit dan jumlah sampel aman yang diuji di Laboratorium Terakreditasi dibagi dengan seluruh sampel yang diuji menggunakan RapiT Tes Kit dan jumlah seluruh sampel yang diuji di laborartorium terakreditasi dikali 100%	Pengujian sampel di pasar 8 Kecamatan	

Meningkatnya Produksi Barang Dan Jasa	3	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Lada	$\frac{\text{(jumlah Produksi lada Tahun Berjalan dikurangi Jumlah Produksi lada Tahun Awal RPJMD)}}{\text{jumlah Produksi Lada Tahun awal RPJMD}} \times 100\%$	Laporan bulanan mantra bun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
			Persentase Peningkatan Produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	$\frac{\text{(jumlah Produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit Tahun Berjalan dikurangi Jumlah Produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit Tahun Awal RPJMD)}}{\text{jumlah Produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit Tahun awal RPJMD}} \times 100\%$	Laporan semester TBS	
	4	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Padi	$\frac{\text{(jumlah Produksi Padi Tahun Berjalan dikurangi jumlah Produksi Padi Tahun Awal RPJMD)}}{\text{jumlah produksi padi Tahun awal RPJMD}} \times 100\%$	Data laporan statistik pertanian	
	5	Meningkatnya Hasil Peternakan	Persentase peningkatan Populasi Ternak (%)	$\frac{\text{(jumlah Populasi Ternak sapi Tahun Berjalan dikurangi Jumlah Populasi Ternak Sapi Tahun Awal RPJMD)}}{\text{jumlah populasi Ternak Sapi Tahun awal RPJMD}} \times 100\%$	Data laporan statistik peternakan	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah izin yang memiliki syarat lengkap dan memenuhi kriteria}}{\text{Jumlah berkas usulan yang didaftarkan}} \times 100\%$	Bidang Perizinan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Produksi Barang Dan Jasa	2	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berdaya Saing	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah aktif}}{\text{Jumlah koperasi yang terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro}}{\text{Jumlah usaha kecil}} \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UMKM	
	3	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Realisasi Investasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi investasi}}{\text{Jumlah investasi yang ditanamkan}} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Daerah	Hasil Audit Pengawasan Kearsipan Eksternal Daerah (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	Nilai Audit Pengawasan Kearsipan Eksternal Daerah (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan Audit Kearsipan Eksternal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Tingkat Kepuasan Pemustaka	Jumlah Pemustaka (responden sesuai rumus Sloovin, 285 responden per 1000 pengunjung berusia 10-59 tahun) yang menyatakan puas/sangat puas minimal empat puluh persen dari Survey Pemustaka (sesuai Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota)	Survey kepuasan pemustaka	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern ( <i>modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i> )	$\frac{\sum PA \text{ Modern}}{\sum \text{Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	Data <i>mCPR</i>	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi ( <i>Unmeet Need</i> )	$\frac{\text{PUS Bukan Peserta KB (IAT+TIAL)}}{\text{Total PUS}} \times 100\%$	Data <i>Unmeet Need</i> )	
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun ( <i>Age Spesific Fertility Rate/ ASFR 15-19</i> )	$\frac{K_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$	Data <i>ASFR</i>	
Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	2	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Ratio KDRT	$\frac{\sum \text{Jumlah KDRT}}{\sum \text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Data KDRT	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Anugerah Prahita Ekapraya	Penghargaan Yang di dapat Dari Kementerian PPPA Apabila Terpenuhinya Semua Kriteria Penilaian	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Akumulasi Poin penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) yang Terpenuhi	Poin Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	$= \frac{\text{Jumlah elemen tiap level yang terpenuhi}}{\text{Total elemen}} \times 100\%$ Ket : Level Kapabilitas APIP : (level 1 initial, level 2 infrastructure, level 3 integrated, level 4 managed dan level 5 optimizing)	Internal Audit Capability Model (IACM)	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan Unsur Pemerintahan Inspektorat Daerah
			Tingkat Maturitas SPIP	$\frac{\text{jumlah unsur SPIP yang terpenuhi}}{\text{Total Unsur SPIP}} \times 100\%$ Ket : Level Maturitas APIP : (level 1 initial, level 2 infrastructure, level 3 integrated, level 4 managed dan level 5 optimizing)	Penilaian SPIP	
Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	IPKD = % Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja + % Pencari kerja yang ditempatkan + % TKA yang terdata + % Perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan dibagi 4	Hasil penghitungan IPKD	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Produksi Barang Dan Jasa	2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dibagi PDRB X 100%	BPS	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Industri
	3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan dibagi PDRB X 100%	BPS	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase batas administrasi kewilayahan yang diselesaikan	$\frac{\text{Batas adm.wilayah sampai dengan th(n) yg diselesaikan}}{\text{batas adm.wilayah yg harus diselesaikan}} \times 100$	Data batas wilayah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
			Nilai Indeks EKPPD	Penilaian/ Evaluasi LPPD oleh kemendagri	Evaluasi LPPD oleh kemendagri	
			Persentase pengelolaan dana hibah tepat sasaran	$\frac{\text{Jumlah penerima bansos dan hibah yang dimanfaatkan sesuai NPHD}}{\text{jumlah total penerima dana bansos dan hibah}} \times 100$	Data penerima bantuan	
			Nilai indeks RB Komponen Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	Penilaian/ Evaluasi oleh Kemenpan RB	Penilaian RB	

	2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan dan Perekonomian	Persentase perangkat daerah yang berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah berkinerja baik}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100$	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Persentase hasil evaluasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang ada}} \times 100$	Evaluasi kebijakan perekonomian	
			Level Kematangan UKPBJ	Penilaian/ Evaluasi oleh LKPP	LKPP	
	3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum	Nilai Indeks Komponen RB Area Penataan dan Penguatan Organisasi	Penilaian/ Evaluasi dari Kemenpan-RB	Penilaian RB	
			Nilai Indeks Komponen RB Area Tata Laksana	Penilaian/ Evaluasi	Penilaian RB	
			Persentase peningkatan pelayanan terhadap KDH/WKDH	$\frac{\text{Jumlah pelayanan kepada KDH/WKDH tahun (n)} - \text{jumlah pelayanan kepada KDH/WKDH tahun (n-1)}}{\text{jumlah pelayanan kepada KDH/WKDH tahun (n-1)}} \times 100$	Bagian Umum	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan Peningkatan Indeks Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	<i>(PERSENTASE KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DI PPAS DAN RAPBD TERHADAP RPKD + PERSENTASE PEMENUHAN ANGGARAN KAS TERHADAP BELANJA DAERAH + PERSENTASE SP2D OPD YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU + PERSENTASE PENERIMAAN DANA TRANSFER + PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN OPD TEPAT WAKTU SESUAI SAP + PERSENTASE OPD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN ASET TEPAT WAKTU + PERSENTASE PEMANFAATAN ASET YANG DIKERJASAMAKAN SESUAI ATURAN YANG BERLAKU + PERSENTASE ASET TANAH DAN BANGUNAN YANG MEMILIKI STATUS KEPEMILIKAN PEMERINTAH DAERAH</i>	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
				$\frac{8}{\dots} \times 100\%$		

	2	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Bidang Pendapatan	
Meningkatnya jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan	1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	$\frac{(\text{Jumlah Wisatawan}_{(t)} - \text{Jumlah wisatawan}_{(t-1)})}{\text{Jumlah Wisatawan}_{(t-1)}} \times 100\%$	Data kunjungan wisatawan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Banyak kamar yang dijual /banyaknya kamar yang tersedia dikali 100 %	Data kunjungan wisatawan	
	2	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	$IPBD = (40\% \times IPLB) + (30\% \times IPGB) + (30\% \times IPMB)$ <p>IPBD : Indeks Pelestarian Budaya Daerah  IPLB : Indeks Perlindungan Budaya  IPGB : Indeks Pengembangan Budaya  IPMD : Indeks Pemanfaatan Budaya</p>	Hasil penghitungan IPBD	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	1	Meningkatnya Layanan Fasilitas Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah agenda yang terselesaikan tepat waktu}}{\text{Seluruh agenda DPRD}} \times 100\%$	Data kegiatan DPRD	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan	1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan	$\frac{\sum \text{Pelanggaran K - 3 yang Tertangani}}{\sum \text{Pelanggaran K - 3 yang Terjadi}} \times 100\%$	Data Pelanggaran K3	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Upaya Penanganan Bencana	2	Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\sum \text{Kasus Kebakaran yang Tertangani dalam Tingkat Waktu Tanggap}}{\sum \text{Kasus Kebakaran yang terjadi dalam Tingkat Waktu Tanggap}} \times 100\%$	Data Respon Time Rate	

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat	$\sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$	Survey Kepuasan Pengguna layanan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
	2	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	$\frac{\sum \text{angkutan umum yang mengikuti uji Kelaikan}}{\sum \text{Kecelakaan lalu lintas angkutan jalan}} \times 100\%$	Data kecelakaan lalu lintas	
Meningkatnya Jumlah Uang Yang Dibelanjakan Wisatawan	1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	$((\text{Jumlah peserta yang dibina pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan}/\text{Jumlah yang di rencanakan} \times 100\%) + (\text{Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Ketahanan sosial dan budaya}/\text{Jumlah yang direncanakan} \times 100\%) + (\text{Jumlah Forum Koordinasi yang dilaksanakan}/\text{Jumlah yang direncanakan} \times 100\%) + (\text{Jumlah penanganan potensi konflik sosial}/\text{Jumlah Potensi konflik sosial yang ada} \times 100\%))/4$	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama  Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
	2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	$((\text{Jumlah Partai Politik yang anggotanya mengikuti pembinaan}/\text{Jumlah Partai politik yang mendapatkan suara} \times 100\%) + (\text{Jumlah Ormas yang anggotanya mengikuti pembinaan}/\text{Jumlah Ormas yang Terdaftar} \times 100\%))/2$	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
Meningkatnya Upaya Penanganan Bencana	1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Dimana : Risk = Risiko Hazard = Bahaya Vulnerability = Kerentanan Capacity = Kapasitas	Buku Indeks Risiko Bencana Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	1	Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Memperoleh Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang Memperoleh Pelayanan Dasar dibagi Jumlah PMKS yang Terdata dikali 100	Data PMKS	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Sosial
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015)	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Kategori Berkembang}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	Hasil Penghitungan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN